



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN VERIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan verifikasi terhadap Kepala Satuan Kerja pada akhir masa jabatannya sebagai pertanggungjawaban selama pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa verifikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi memenuhi tuntutan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Verifikasi adalah pemeriksaan kinerja Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polri pada akhir masa jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi Polri pelaksana program dan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA.
4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pejabat dari unit organisasi Polri yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA.
5. Auditor adalah aparat pengawas di lingkungan Polri yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini: **BHAKTI - DHARMA - WASPADA**

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan verifikasi di lingkungan Polri; dan
- b. untuk pertanggungjawaban kinerja Kasatker di lingkungan Polri dalam mengelola pelaksanaan operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan Satker.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini:

- a. prosedural, yaitu verifikasi dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. profesional, yaitu petugas pelaksana verifikasi memiliki kemampuan *auditing*;
- c. legalitas

- c. legalitas, yaitu data hasil verifikasi disusun berdasarkan fakta dan keterangan dari pejabat penanggung jawab tugas dan fungsi Satker;
- d. transparan, yaitu verifikasi dilaksanakan secara terbuka sesuai fakta yang ada;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan verifikasi dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. independen, yaitu pelaksana verifikasi bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

BAB II

METODE DAN OBJEK VERIFIKASI

Pasal 4

Metode verifikasi meliputi:

- a. konfirmasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh bukti guna meyakinkan Auditor, dengan cara meminta informasi yang sah dari pihak yang terkait;
- b. klarifikasi, yaitu kegiatan verifikasi untuk menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu;
- c. analisis, yaitu kegiatan untuk mengurai unsur yang lebih kecil atau bagian dari data dan informasi, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain; dan
- d. evaluasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan yang terkait dengan berbagai informasi.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum Polri; dan
 - b. Inspektorat Pengawasan Daerah
- (2) Inspektorat Pengawasan Umum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan verifikasi terhadap objek verifikasi sebagai berikut:
 - a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Inspektorat Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan verifikasi terhadap objek verifikasi sebagai berikut:
 - a. Kasatker di lingkungan Polda; dan
 - b. Kepala Kepolisian Resor.

Pasal 6

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan verifikasi, Objek Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengisi kisi-kisi data yang diberikan oleh tim verifikasi;
- b. menjawab konfirmasi dan klarifikasi atas data-data yang diberikan kepada tim verifikasi;
- c. mempersiapkan dokumen yang diperlukan tim verifikasi; dan
- d. mempersiapkan tutup buku kas bank.

BAB III

TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi merupakan aparat pengawas intern di lingkungan Polri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi, meliputi:
 - a. Tingkat Mabes Polri ditunjuk dengan surat perintah Kapolri; dan
 - b. Tingkat Polda ditunjuk dengan surat perintah Kapolda.
- (2) Tim verifikasi pada tingkat Mabes Polri terdiri dari:
 - a. Inspektur Bidang/Kepala Bagian;
 - b. Auditor; dan
 - c. Kepala Subbagian.
- (3) Tim verifikasi pada tingkat Polda terdiri dari:
 - a. Inspektur Bidang;
 - b. Auditor;
 - c. Perwira pemeriksa; dan
 - d. Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan tim verifikasi pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Inspektur Pengawasan Umum Polri/Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b. Ketua Tim : 1. Inspektur Bidang sesuai wilayah yang menjadi pantauan Inspektorat Wilayah;
2. Inspektur Bidang di luar daerah pantauan;
3. Kepala Bagian yang ditunjuk; atau
4. Auditor yang ditunjuk;
 - c. Sekretaris Tim : Auditor atau Kepala Subbagian yang ditunjuk; dan
 - d. Anggota

- d. Anggota Tim : Inspektur Bidang atau Kepala Bagian atau auditor atau Kepala Sub Bagian yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:
- Penanggung jawab : Inspektur Pengawasan Daerah;
 - Ketua Tim : Inspektur Bidang yang ditunjuk;
 - Sekretaris Tim : Auditor yang ditunjuk; dan
 - Anggota Tim : Auditor atau Perwira Pemeriksa atau Kepala Subbagian yang ditunjuk.

Pasal 9

Tim verifikasi melaksanakan tugas:

- mengirimkan kisi-kisi data yang diperlukan kepada objek verifikasi;
- melaksanakan verifikasi atas pengelolaan manajemen operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan; dan
- menyusun dan melaporkan hasil verifikasi kepada:
 - Kapolri dan Kasatker pengganti, pada tingkat Mabes Polri; dan
 - Kapolda dan Kasatker pengganti, pada tingkat Polda.

BAB IV

PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 10

- Verifikasi dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan Satker yang ditetapkan selama masa jabatan Kasatker.
- Untuk menilai pencapaian kinerja perlu data di bidang:
 - operasional, meliputi:
 - kegiatan operasional Satker yang sudah dilaksanakan;
 - kegiatan operasional Satker yang sudah direncanakan namun belum dilaksanakan;
 - pelaksanaan kebijakan, antara lain:
 - kebijakan Kapolri; dan
 - kebijakan Kasatker.

b. Sumber

- b. Sumber Daya Manusia, meliputi:
1. data kekuatan personel sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) dan realisasi;
 2. data jabatan yang belum terisi;
 3. data jabatan yang diduduki oleh pejabat yang tidak sesuai kepangkatan/eselonnya;
 4. data Perwira yang belum mendapat jabatan;
 5. data personel yang mengalami sakit menahun;
 6. data Diktuk dan Dikbang;
 7. data pembinaan personel; dan
 8. data pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana.
- c. sarana dan prasarana, antara lain:
1. data inventaris Barang Milik Negara;
 2. data tanah yang belum bersertifikat;
 3. data tanah dan bangunan yang bermasalah;
 4. data hasil hibah yang belum masuk ke dalam sistem informasi akuntansi barang milik negara;
 5. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
 6. data usulan penghapusan barang milik negara.
- d. anggaran dan Keuangan, meliputi:
1. pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdiri dari:
 - a) aplikasi dan penatabukuan manual;
 - b) anggaran bersifat khusus; dan
 - c) tunjangan kinerja;
 2. pengelolaan dana nonanggaran pendapatan dan belanja negara, antara lain:
 - a) dana sistem administrasi manunggal satu atap;
 - b) dana pemeliharaan kesehatan;
 - c) dana hibah;
 - d) dana rumah sakit nonbadan layanan umum;
 - e) dana pengamanan objek vital; dan
 - f) dana lainnya.
3. pengelolaan

3. pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak, meliputi:

- a) penerimaan negara bukan pajak dari badan layanan umum; dan
- b) penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(3) Selain mendapatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim verifikasi melakukan kegiatan:

- a. meneliti naskah laporan kesatuan dan memori serah terima jabatan;
- b. mengkonfirmasi data personel, Sarana Prasarana, dan fasilitas Kepolisian yang tertuang dalam naskah laporan kesatuan serah terima jabatan Kasatker;
- c. menginventarisasi permasalahan yang belum dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. meminta objek verifikasi untuk menutup seluruh buku kas bank berkaitan dengan pengelolaan bidang anggaran keuangan dan mencocokkan dengan fisik uang yang ada dalam berangkas dengan melampirkan rekening koran bank.

Pasal 11

- (1) Tutup buku kas bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diketahui ketua tim verifikasi.
- (2) Setelah dilaksanakan tutup buku kas bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat lama tidak mempunyai hak untuk membuat kebijakan di bidang anggaran keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. hasil yang dicapai atas kinerja objek verifikasi;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan verifikasi dan dikirimkan oleh ketua tim kepada:
 - a. Kapolri dan Kasatker pengganti dengan tembusan Irwasum Polri; dan

b. Kapolda

- b. Kapolda dan Kasatker pengganti dengan tembusan kepada Irwasda.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan verifikasi melampirkan:
- Format laporan tutup buku kas Bank;
 - Format laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - Format berita acara pemeriksaan kas;
 - Format surat pernyataan tidak mempunyai utang atau pinjaman dari pihak ketiga;
 - Format berita acara pemeriksaan kas berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan
 - Format berita acara pemeriksaan fisik barang milik negara yang tersedia di gudang.
- (5) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berisi tentang permasalahan yang perlu mendapatkan atensi dan tindak lanjut dari Kasatker pengganti.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh objek verifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Format laporan hasil verifikasi dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

Dalam keadaan tertentu verifikasi dapat dilaksanakan setelah serah terima jabatan atas perintah Kapolri/Kapolda.

Pasal 14

Administrasi penyelenggaraan verifikasi, meliputi:

- surat perintah Kapolri/Kapolda tentang penunjukan tim verifikasi;
- surat perintah perjalanan dinas;
- surat telegram pemberitahuan tentang kegiatan verifikasi kepada Kasatker; dan
- kisi-kisi data verifikasi yang diperlukan.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan yang berkaitan dengan verifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

- a. Pasal 9 dan Pasal 13 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan di Lingkungan Polri; dan
- b. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Polri.

Pasal 16

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

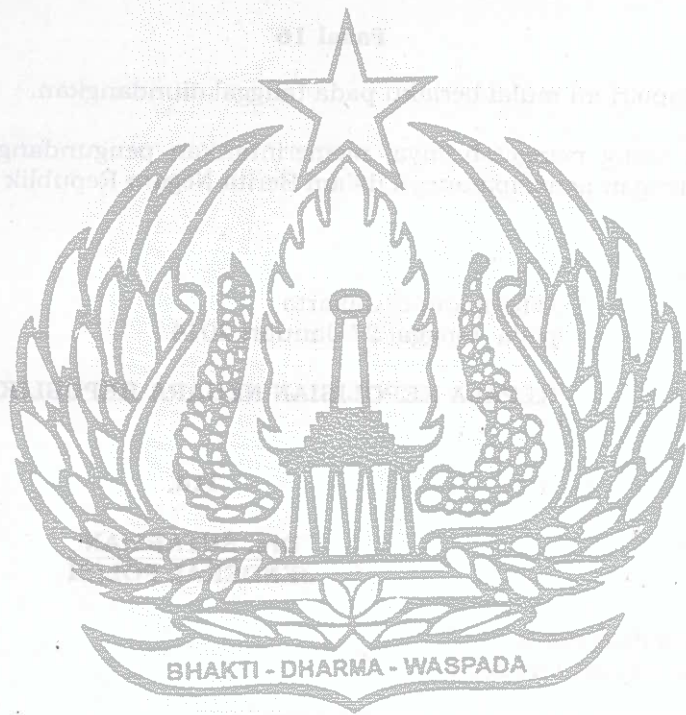
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 121





LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN VERIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR LAMPIRAN

1. CONTOH KISI-KISI DAN CARA PELAPORAN VERIFIKASI PADA SATUAN KERJA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. CONTOH KISI-KISI DAN CARA PELAPORAN VERIFIKASI PADA POLDA/ POLRES
3. CONTOH FORMAT LAPORAN TUTUP BUKU (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
4. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI UTANG ATAU PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN BELANGKO HASIL PENGADAAN PNPB (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)
8. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG MILIK NEGARA YANG TERSEDIA DI GUDANG (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)



1. CONTOH KISI-KISI DAN CARA PELAPORAN VERIFIKASI PADA SATUAN KERJA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM

CONTOH

LAPORAN HASIL VERIFIKASI ITWASUM POLRI
PADA
TANGGAL ... S.D. 201..

I. PENDAHULUAN

1. Dasar:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/...../.../20.. tanggal 20.. tentang Pemberitahuan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri; dan
- c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/...../.../20.. tanggal 20.. tentang perintah tugas melaksanakan verifikasi dalam rangka pelaksanaan serah terima jabatan (nama jabatan Kasatker).

2. Maksud dan tujuan;

a. Maksud

Untuk memperoleh gambaran tentang posisi awal dan terakhir masalah pengelolaan program, anggaran dan sumber daya lainnya serta permasalahan-permasalahan yang ada di (nama Kasatker) dalam masa jabatan **Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol** (nama Kasatker) dari tanggal 20.. s.d 20...

b. Tujuan.

Untuk digunakan sebagai bahan masukan kepada pimpinan Polri dan pejabat baru (nama jabatan Kasatker) **Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol** (nama Kasatker) dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

3. Ruang lingkup;

Meliputi verifikasi di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras), dan pengelolaan Anggaran dan Keuangan (Garku) serta verifikasi sumber daya lainnya pada masa jabatan (nama jabatan Kasatker) **Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol** (nama Kasatker).

4. Tata.....

4. Tata Urut:

- BAB I PENDAHULUAN**
BAB II PELAKSANAAN
BAB III HASIL YANG DICAPAI
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
BAB V PENUTUP

II. PELAKSANAAN

- 1) **Waktu:** Hari s.d. tanggal .. s.d. 20..
- 2) **Personel:**
 - a. Komjen Pol, jabatan Irwasum Polri, selaku penanggung jawab Tim.
 - b. Kombes Pol, jabatan Irbidjemen..... Itwil Itwasum Polri, selaku Ketua Tim;
 - c. AKBP, jabatan Itwasum Polri, selaku Anggota merangkap Sekretaris Tim; dan
 - d. Kombes Pol, jabatan Irbidjemen...../Auditor Itwil Itwasum Polri, selaku Anggota;

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Visi dan misi
2. Kebijakan strategi
3. Sasaran prioritas
4. Inovasi (nama jabatan Kasatker) selama masa jabatan Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol (nama Kasatker) dalam mendukung pelaksanaan tugas:
 - a)
 - b)
 - c), dst.

5. Dari.....

5. Dari hasil Verifikasi pada (nama Satker) di bidang Operasional, SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran Keuangan dapat ditemukan data fakta dan permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Operasional

(Diisi sesuai program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker yang diverifikasi, sesuai Peraturan Kapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia).

b. Bidang SDM

- 1) personel Polri dan PNS Polri secara Riil dan DSP berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sampai dengan bulan 20.... (terakhir masa jabatan) sebanyak orang terdiri dari anggota Polri sebanyak orang dan PNS sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kekuatan personel Polri:

NO.	PANGKAT	POLRI		KET.
		DSP	RIL	
1	2	3	4	5
1.	Irjen			
2.	Brigjen			
3.	Kombes Pol			
4.	AKBP			
5.	Kompol			
6.	AKP			
7.	Inspektur			
8.	Ba /Ta			
Jumlah				

b) Personel PNS

NO.	PANGKAT	POLRI		KET.
		DSP	RIL	
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV			
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			
5.	Capeg			
Jumlah				

2) Kualifikasi pendidikan umum

NO.	PANGKAT	JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN					KET.
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

3) Kualifikasi.....

3) Kualifikasi pendidikan pembentukan

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH	AKPOL	SEPA	SEBA	KET.
1.	PAMEN					
2.	PAMA					
3.	BINTARA					
	JUMLAH					

4) Kualifikasi pendidikan pengembangan

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JML	LEM HANAS	SESKO ABRI	SES PATI	SES PIM	PTIK/STIK	SE LAPA	SE TUKPA	SE BA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAMEN									
2.	PAMA									
3.	BINTARA									
	JUMLAH									

5) Kualifikasi pendidikan spesialis

NO.	KEJURUAN	PATI	PAMEN	PAMA	BA/TA	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				JML
						GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	LANTAS									
2.	RESERSE A. SERSE									
	B. SERSE									
3.	INTEL A. INTEL									
	B. INTEL									
4.	SABHARA									
5.	BRIMOB									
6.	SDM									
7.	SARPRAS									
8.	GARKU									
9.	PERENCANAAN									
	LAIN-LAIN									
	JUMLAH									

6) Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	KET.
1.	PNS golongan IV						
2.	PNS golongan III						
3.	PNS golongan II						
4.	PNS golongan I						
	Jumlah						

7) Personel.....

7) Personel yang tidak memangku jabatan (non Job)

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
A	POLRI		
1.	Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL)		
2.	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)		
3.	Komisaris Polisi (KOMPOL)		
4.	Ajun Komisaris Polisi (AKP)		
5.	Inspektur Polisi Satu (IPTU)		
6.	Inspektur Polisi Dua (IPDA)		
7.	Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU)		
8.	Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA)		
9.	Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA)		
10.	Brigadir Polisi		
11.	Brigadir Polisi Satu (BRIPTU)		
12.	Brigadir Polisi Dua (BRIPDA)		
B	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
1.	Golongan I		
2.	Golongan II		
3.	Golongan III		
4.	Golongan IV		
	Jumlah		

8) Perawatan personel

NO.	PANGKAT/GOLONGAN s.d. 20..	 s.d. 20..		KET.
		USULAN	RIL	USULAN	RIL	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perwira Menengah (Pamen)					
2.	Perwira Pertama (Pama)					
3.	Bintara (Ba)					
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
	a. golongan IV					
	b. golongan III					
	c. golongan II					
	d. golongan I					
	Jumlah					

9) Pelaksanaan rekrutmen

NO.	JENIS REKRUITMEN	RENCANA	REALISASI	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2 BHAKTI - DHARMA - WASPADA	3	4	5	6
1.				
2.				

10) Data keluar/masuk, sebagai berikut:

NO.	URAIAN s.d. 20.. s.d. 20..
1	2	3	4
1.	Masuk (orang)		
	a. Pamen		
	b. Pama		
	c. Ba		
	d. PNS		
2.	Keluar (orang)		
	a. Pamen		
	b. Pama		
	c. Ba		
	d. PNS		
	Jumlah		

11) Personel.....

- 11) Personel Polri yang bertugas di luar organisasi Polri
sebanyak orang, dengan rincian:
- Tahun 20..... orang.
 - Tahun 20..... orang.
- 12) Personel Polri yang mendapat penghargaan (nama jabatan Kasatker) atas keberhasilan menyelamatkan keuangan negara:

NO.	SURAT KEPUTUSAN	JUMLAH DAN SATKER	JENIS REWARD
1.		
2.dst		

- 13) Personel yang mengikuti Tes Kesamaptaaan Jasmani (TKJ):

NO.	URAIAN s.d. 20.. s.d. 20..
1.	personel yang ikut		
2.	personel tidak ikut		
3.	% pencapaian hasil		

- 14) Data PHL pada (nama Satker):

- Jumlah PHL : orang
- PHL masuk database : orang

- 15) Rekapitulasi pemegang Senpi organik Polri

-
-dst.

- 16) permasalahan bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

-
-dst.

c. Bidang Sarana Prasarana

- 1) Pengadaan barang/jasa

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.					
2.dst					

- 2) Pemeliharaan barang

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.dst					

- 3) Usulan

3) Usulan penghapusan barang

NO.	SURAT USULAN PENGHAPUSAN	BARANG YANG DIHAPUS	KET.
1	2	3	4
1.		
2.dst		

4) Data rekapitulasi Sarana Prasarana (Sarpras)

a) Markas Kantor (Mako)

NO.	SATKER	KONDISI			JML	KET.
		BB	RR	RB		
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.					
3.dst					
JUMLAH						

b) Rumah Dinas (Rumdin)

NO.	SATKER	RUMDIN							BRK	FLAT
		T. 36	T. 54	T. 70	T. 120	T. 130	T. 160	T. 250		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.									
2.									
3.dst									
JUMLAH										

c) Aset tanah yang telah sertifikat seluas M²
..... Persil dan yang belum sertifikat seluas
M² terdiri dari:

NO.	URAIAN	PERSIL	LUAS (M ²)
1	2	3	4
1.		
2.		
3. BHDSTI - DHARMA - WASPADA		

d) Aset digugat pihak ketiga:

NO.	ALAMAT DAN PEMANFAATAN ASET	LUAS (M ²)	PROSES
1	2	3	4
1.		
2.		
3.dst		

e) Data bangunan, amunisi, alat angkut, alat apung,
Alsuspol, Senpi, Alsintor dan Alsatri terlampir;

5) Data

5) Data sarana prasarana berasal dari hibah:

NO	JENIS MATERIIL	NILAI (Rp)	SURAT HIBAH	PEMBERI HIBAH
1	2	3	4	5
1.			
2.			
3.dst			

6) Data sarana prasarana disewakan kepada pihak ketiga:

NO	JENIS MATERIIL	NILAI (Rp)	SURAT PERJANJIAN	PIHAK PEMINJAM
1	2	3	4	5
1.			
2.			
3.dst			

7) Pengadaan BMP

NO.	BMP	KETERANGAN 20.....	20.....	s.d. 20.....
1	2	3	4	5	6
1.	MT 88	DIPA 1 THN (Rp)			
		DISTRIBUSI (Liter)			
		REALISASI (Liter)			
		SISA (Liter)			
		PEMBAYARAN (Rp)			
2.	HSD	DISTRIBUSI (Liter)			
		REALISASI (Liter)			
		SISA (Liter)			
		PEMBAYARAN (Rp)			
3.	PELUMAS	DISTRIBUSI (Liter)			
		REALISASI (Liter)			
		SISA (Liter)			
		PEMBAYARAN (Rp)			
		REALISASI JS ANGKUT (Rp)			

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

8) Anggaran listrik dan air

a) Pemakaian anggaran Listrik

NO.	URAIAN	20.....	20....	20.....
1	2	3	4	5
1.	DIPA			
2.	REVISI DIPA			
3.	TUNGGAKAN LISTRIK			
4.	TAGIHAN PEMAKAIAN			
5.	SISA PAGU			

b) pemakaian

b) Pemakaian anggaran air

NO.	URAIAN	20.....	20....	20.....
1	2	3	4	5
1.	DIPA			
2.	REVISI DIPA			
3.	TUNGGAKAN AIR			
4.	TAGIHAN PEMAKAIAN			
5.	SISA PAGU			

9) Laporan Aset Barang Milik Negara dan jajaran, Komposisi Neraca per 31 Desember 20.... adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PER 31 DESEMBER 20..	PER 30 JUNI 20..	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Barang Konsumsi			
2.	Amunisi			
3.	Bahan untuk pemeliharaan			
4.	Suku cadang			
5.	Uraian Akun tidak ada			
6.	Pita cukai, materai dan leges			
7.	Bahan baku			
8.	persediaan untuk tujuan			
9.	Persediaan lainnya			
10.	Tanah			
11.	Peralatan dan Mesin			
12.	Gedung dan Bangunan			
13.	Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan			
14.	Aset tetap lainnya			
15.	Konstruksi dalam pengerjaan			
	Jumlah			

Jumlah Aset per 31 Desember 20.. sebesar: Rp.,-
Terdiri dari:

Aset lancar sebesar : Rp.,-
Aset tetap sebesar : Rp.,-
Aset lainnya sebesar : Rp.,-
Jumlah Total Aset : Rp.,-

Keterangan

Untuk posisi aset per 30 Juni 20.... belum bisa diketahui, karena masih diadakan Rekonsiliasi data antara Satker/Satwil dengan Biro Sarpras dan KPKNL Palembang dan KPKNL Lahat serta DJKN

10) permasalahan **Bidang Sarana Prasarana (Sarpras)**

- a)
- b)dst.

d. Bidang

d. Bidang Anggaran Keuangan

1) Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN):

a) Daya serap, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PROSEN TASE (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja pegawai				
2.	Belanja barang				
3.	Belanja modal				
	JUMLAH				

b) anggaran bersifat khusus/kontijensi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Operasional				
2.	Operasional				
3.	Operasional				
	JUMLAH				

c) tunjangan kinerja

NO.	URAIAN/BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	SISA				
2.	PENERIMAAN				
a.	Bulan				
b.	Bulan				
c.	Bulan				
	JUMLAH				

2) Non APBN:

a) Dana Pemeliharaan Kesehatan/DPK (Rumah Sakit Badan Layanan Umum/Objek Vital/dana lainnya)

NO.	URAIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sisa			
2.	Terima dari			
3.	Transaksi			
	JUMLAH			

b) dana lainnya

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.			
2.			
3.dst			
	JUMLAH			

3) Penerimaan

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP:

a) jasa Kepolisian

NO.	URAIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.			
2.dst			
	JUMLAH			

b) utang

NO.	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.				
2.dst				
	JUMLAH				

c) piutang denda keterlambatan/tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi

NO.	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	tuntutan perbendaharaan				
2.	tuntutan ganti rugi				
3.	denda keterlambatan				
	JUMLAH				

d) tuntutan perbendaharaan/TP

NO.	URAIAN	TA (Rp)	TA (Rp)	KET.
1	2	3	4	6
1.	Jumlah kerugian			
2.	Jumlah angsuran			
3.	Sisa pembebanan			
	JUMLAH			

e) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

NO.	URAIAN	TA (Rp)	TA (Rp)	KET.
1	2	3	4	6
1.	Jumlah kerugian			
2.	Jumlah angsuran			
3.	Sisa pembebanan			
	JUMLAH			

4) Badan Layanan Umum/BLU

NO.	URAIAN/BULAN	PENDAPATAN (Rp)		SISA (Rp)	KET.
		PENERIMAAN	PENGELUARAN		
1	2	3	4	5	6
1.				
2.dst				
	JUMLAH				

5) permasalahan bidang anggaran keuangan

- a)
- b)

IV. PERMASALAHAN

4. Tata Urut:
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II PELAKSANAAN
 - BAB III HASIL YANG DICAPAI
 - BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
 - BAB V PENUTUP

II. PELAKSANAAN

1. Waktu: Hari s.d. tanggal .. s.d. 20..
2. Personel:
 - a. Komjen Pol, jabatan Irwasum Polri, selaku penanggung jawab Tim.
 - b. Kombes Pol, jabatan Irbidjemen..... Itwil Itwasum Polri, selaku Ketua Tim;
 - c. AKBP, jabatan Itwasum Polri, selaku Anggota merangkap Sekretaris Tim; dan
 - d. Kombes Pol, jabatan Irbidjemen...../Auditor Itwil Itwasum Polri, selaku Anggota;

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Visi dan misi
2. Kebijakan strategi
3. Sasaran prioritas
4. Inovasi (nama jabatan Kasatker) selama masa jabatan Brigjen Pol/Irjen Pol (nama Kasatker) dalam mendukung pelaksanaan tugas: *contoh
 - a) Jum'at Keliling (Jumling) Kapolda/Kapolres/Kapolsek melaksanakan tatap muka dengan masyarakat di wilayahnya;
 - b) Fokus Group Diskusi (FGD) memecahkan permasalahan masyarakat yang belum/tidak terselesaikan melibatkan para Kapolsek setiap bulan;

5. Dari.....

5. Dari hasil verifikasi pada Polda di bidang Operasional, Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran Keuangan dapat ditemukan data fakta dan permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Operasional

1) Biro Operasi (Roops)

- a) pelaksanaan operasi tahun anggaran s.d..... 20...

NO.	SANDI OPERASI	WAKTU	HASIL PELAKSANAAN OPERASI			KET
			KASUS	TERSANGKA	BARANG BUKTI	
1	2	3	4	5	6	8
A OPERASI TERPUSAT						
1.	OPERASI Tahun 20..... s.d. 20..... (..... hari) kasus tersangka	- -	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena
2.	OPERASI B 20.... (.....) hari dari tanggal s.d. 20.. kasus tersangka	- pucuk (.....); dan - buah (.....)	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena
B OPERASI MANDIRI KEWILAYAHAN						
1.	OPERASI Tahun 20..... s.d. 20..... (..... hari) kasus tersangka	- -	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena
2.	OPERASI B 20.... (.....) hari dari tanggal s.d. 20.. kasus tersangka	- pucuk (.....); dan - buah (.....)	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena

C. Operasi.....

1	2	3	4	5	6	8
C OPERASI KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LANTAS						
1.	OPERASI Tahun 20..... s.d. 20.... (..... Hari) kasus tersangka	- -	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena
2.	OPERASI B 20.... (.....) hari dari tanggal S.D.20... kasus tersangka	- pucuk (.....); dan - buah (.....)	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena
D OPERASI KONTIJENSI						
1.	OPERASI Tahun 20..... s.d. 20.... (..... hari) kasus tersangka	- -	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena
2.	OPERASI B 20.... (.....) hari dari tanggal S.D.20... kasus tersangka	- pucuk (.....); dan - buah (.....)	dalam proses karena dan belum ditindak lanjuti Karena

b) Kekuatan personel yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi:

NO.	JENIS OPERASI	URAIAN	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	OPERASI	PERWIRA MENENGAH (PAMEN)		
		PAMA		
		BINTARA		
		PNS		
2.	OPERASI	PERWIRA MENENGAH (PAMEN)		
		PAMA		
		BINTARA		
		PNS		
JUMLAH				

c) Jenis

c) Jenis-jenis operasi tersebut yang belum terlaksana:

NO.	JENIS OPERASI	WAKTU	ALASAN BELUM DILAKSANAKAN
1	2	3	4

d) Jenis-jenis operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, adalah:

- (1) operasi Ketupat 20.. telah terselenggara pada tanggal dengan didukung anggaran kontinjensi Kapolda;
- (2) operasi Lilin 20.. telah sesuai waktu diselenggarakan pada bulan

e) pelaksanaan operasi yang didukung anggaran hibah:

NO.	JENIS OPERASI	WAKTU	ASAL DAN JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4

f) permasalahan Biro Operasi (Roops)

- (1)
- (2)dst

2) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim)

a) data kejahatan konvensional

- (1) Tahun anggaran s.d.20..

NO	JENIS KEJAHATAN	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
				LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENCURIAN BERAT								
2.	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN								
3.	ANIAYA BERAT								
4.	KEBAKARAN								
5.	PEMBUNUHAN								
6.	PEMERASAN/ ANCAMAN								
7.	PERKOSAAN								
8.	PERJUDIAN								
9.	PEMALSUAN SURAT								
10.	MERUSAK BARANG								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	PENCULIKAN								
12.	PENIPUAN								
13.	PENGGELAPAN								
14.	PEMBAKARAN								
15.	SUMPAH PALSU								
16.	PENGHINAAN								
17.	ANIAYA RINGAN								
18.	AKIBAT ORANG LUKA RINGAN								
19.	AKIBAT ORANG LUKA								
20.	PENCURIAN RINGAN								
21.	PENADAHAN								
22.	PEMALSUAN MERK								
23.	KEJAHATAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) GOLONGAN I								
24.	KEJAHATAN KUHP GOLONGAN II								
25.	MENERIMA SUAP								
26.	KESUSILAAAN								
27.	PENGANIAYAAN								
28.	KECELAKAAN LALU LINTAS MENINGGAL DUNIA								
29.	KECELAKAAN LALU LINTAS LUKA								
30.	UTANG PIUTANG								
31.	JABATAN								
32.	LAIN-LAIN								
JUMLAH									

b) data 11 kejahatan konvensional yang terjadi di masing-masing wilayah, sebagai berikut:

(1) Penanganan Tindak Pidana (TP) pencurian

(a) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES									
5.	POLRES ...									

(b) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES									
5.	POLRES ...									

(2) Penanganan

(2) Penanganan Tindak Pidana (TP) pencurian berat

(a) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(3) Penanganan Tindak Pidana (TP) pencurian dengan kekerasan

(a) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(4) Penanganan Tindak Pidana (TP) pencurian kendaraan bermotor

(a) Tahun anggaran s.d. 20....., dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

b) Tahun

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(5) Penanganan Tindak Pidana (TP)
penganiayaan berat

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(6) Penanganan Tindak Pidana (TP) pembunuhan

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(7) Penanganan

(7) Penanganan Tindak Pidana (TP) penculikan

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(8) Penanganan Tindak Pidana (TP) penipuan

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(9) Penanganan Tindak Pidana (TP) penggelapan

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun.....

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(10) Penanganan Tindak Pidana (TP) unjuk rasa

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(11) Penanganan Tindak Pidana (TP) perjudian

(a) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(b) Tahun anggaran s.d. 20.....,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

c) permasalahan

c) permasalahan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)

(1)

(2)

3) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

*CATATAN: belangko diisi sesuai masa jabatan pejabat yang akan diganti

a) data penanganan tindak pidana korupsi

(1) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(2) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

b) data penanganan tindak pidana illegal minning

(1) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(2) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES									
5.	POLRESdst									

c) data

- 5) Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)
 *CATATAN: belangko diisi sesuai masa jabatan pejabat yang akan diganti

a) Laporan barang bukti:

(1) s.d. 20..

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
A	BARANG BUKTI DITRESKRIMUM		
1.	UANG		
2.	PERHIASAN		
3.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R4		
a.	TOYOTA		
b.	MITSUBISHI		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
4.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R2		
a.	VESPA		
b.	YAMAHA		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
e.	KAWASAKI		
f.	SANEX		
5. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
6. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
7. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
	JUMLAH		
B	BARANG BUKTI DITRESKRIMSUS		
1.	UANG		
2.	PERHIASAN		
3.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R4		
a.	TOYOTA		
b.	MITSUBISHI		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
4.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R2		
a.	VESPA		
b.	YAMAHA		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
e.	KAWASAKI		
f.	SANEX		
5. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
6. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
7. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
	JUMLAH		

c. BARANG

1	2	3	4
C	BARANG BUKTI DITNARKOBA		
1.	UANG		
2.	PERHIASAN		
3.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R4		
a.	TOYOTA		
b.	MITSUBISHI		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
4.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R2		
a.	VESPA		
b.	YAMAHA		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
e.	KAWASAKI		
f.	SANEX		
5. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
6. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
7. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		

(1) s.d. 20..

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
A	BARANG BUKTI DITRESKRIMUM		
1.	UANG		
2.	PERHIASAN		
3.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R4		
a.	TOYOTA		
b.	MITSUBISHI		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
4.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R2		
a.	VESPA		
b.	YAMAHA		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
e.	KAWASAKI		
f.	SANEX		
5. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
6. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
7. (DIISI SESUAI DENGAN BB YANG ADA)		
JUMLAH			
B	BARANG BUKTI DITRESKRIMSUS		
1.	UANG		
2.	PERHIASAN		
3.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R4		
a.	TOYOTA		
b.	MITSUBISHI		
c.	HONDA		
d.	SUZUKI		
4.	KENDARAAN BERMOTOR (RANMOR) R2		
a.	VESPA		
b.	YAMAHA		

c. HONDA

c) Penerimaan dan penyaluran belangko SKCK:

NO.	JENIS MATERIL	SISA TAHUN LALU (LB)	PENERIMAAN (LB)	PENYALURAN (LB)	SISA (LB)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
JUMLAH					

d) permasalahan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam)

(1)

(2)dst

7) Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair)

a) data penanganan tindak pidana illegal logging:

(1) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(2) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

b) data penanganan tindak pidana ilegal fishing:

(1) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAN KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(2) tahun

(2) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITRESKRIMUM									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

CATATAN:

1. data penanganan tindak pidana disesuaikan dengan yang ditangani oleh fungsi Polair (illegal logging, illegal fishing, illegal minning, BBM illegal, penggelapan, pelayaran, pembuangan limbah, kabel bawah laut, pencurian ikan, pencurian berat, sumber daya alam, kepabeanaan, kecelakaan laut, penemuan kayu, narkotika, penemuan mayat, ABK meninggal di kapal, bentrok nelayan, kapal tenggelam, kapal terdampar, kebakaran kapal dan lain-lain); dan
2. bersumber dari Polres yang memiliki Satpolair.

c) kegiatan rutin yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS KEGIATAN	JML	SASARAN	HASIL YANG DICAPAI	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENJAGAAN MARKAS KANTOR DAN POS PENGAMANAN PERAIRAN (POS, POS, POS, DAN POS)					
2.	PATROLI PERAIRAN					
3.	BINAMITRA PERAIRAN					
4.	PENGAMANAN PERAIRAN					
5.	RESCUE (SAR) PERAIRAN					
6.	PEMERIKSAAN KAPAL					
JUMLAH						

c) permasalahan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair)

(1)

(2)dst

8) Direktorat

8) Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara)

a) Kegiatan rutin yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS KEGIATAN	JML	SASA-RAN	HASIL YANG DICAPAI	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	SUBDIREKTORAT PENUGASAN UMUM (GASUM)					
1.	PENJAGAAN					
	a. MARKAS KANTOR;					
	b. PENJAGAAN KEDIAMAN;					
	c. PENJAGAAN TEMPAT HIBURAN;					
	d. OBJEK VITAL.					
2.	PENGAWALAN					
	a. UANG DAN BARANG BERHARGA;					
	b. VVIP/INSTANSI PEMERINTAH.					
3.	PATROLI RODA 2					
	a. PATROLI BEAT DAN LINTAS WILAYAH;					
	b. PATROLI SAMBANG;					
	c. PATROLI ANTARWILAYAH;					
	d. PENGATURAN LALU LINTAS;					
4.	PATROLI RODA 4					
	a. PATROLI BEAT DAN LINTAS WILAYAH;					
	b. PATROLI SAMBANG;					
	c. PATROLI ANTARWILAYAH;					
	d. POLISI MASYARAKAT (POLMAS);					
	e. BENCANA ALAM: 1) KEBAKARAN; 2) BANJIR; 3) TANAH LONGSOR & PHN TUMBANG.					
	f. PENGAMANAN SEPAK BOLA					
	g. PENGAMANAN UNJUK RASA					
	JUMLAH					
II	SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN MASYARAKAT					
	a. PENGAMANAN SEPAK BOLA					
	b. PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)					
	c. PENGAMANAN UNJUK RASA					
	d. PENGAMANAN MUSIK/ KESENIAN					
	JUMLAH					
III	UNIT SATWA					
	a. PELACAKAN KRIMINAL UMUM					
	b. PENGAMANAN/STERILISASI BAHAN PELEDAK DAN NARKOTIKA					
	JUMLAH					

b) Kegiatan

- b) Kegiatan pengamanan unjuk rasa back up Polres dan jajaran, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	POLRES	KEGIATAN BACK UP				JUMLAH
		UNJUK RASA	SEPAK BOLA	PEMILIHAN KEPALA DAERAH	PENGAMANAN MUSIK/KESENIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	POLRES					
2.	POLRES					
3.	POLRES					
4.	POLRESdst					
JUMLAH						

- c) Kegiatan pelacakan dan pengamanan/sterilisasi, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	POLRES	PELACAKAN KRIMINAL	PENGAMANAN STERILISASI BAHAN PELEDAK & NARKOTIKA	JUMLAH
1.	POLRES			
2.	POLRES			
3.	POLRES			
4.	POLRESdst			
JUMLAH				

- d) permasalahan Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara)

- 9) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

- a) Kegiatan pengamanan personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan termasuk *Very Very Important Person (VVIP)* dan *Very Important Person (VIP)* dan objek pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KESATUAN	PENGAMANAN			JUMLAH PELAKSANAAN	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)
		LOKASI	VVIP	VIP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUBDIREKTORAT KAWASAN TERTENTU (SUBDITWASTER)	a.				
		b.				
		c.				
2.	SUBDIREKTORAT PARIWISATA (SUBDITWISATA)	a.				
		b.				
		c.				
JUMLAH						

- b) Kegiatan pengamanan daerah wisata, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	RENCANA KEGIATAN	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	SUBDITWASTER				
	a. Pengamanan				
2.	SUBDITWISATA				
	a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				

1	2	3	4	5	6
3.	SUBDITLEMNEG a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				
4.	SUBDITKILAS a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				
JUMLAH					

b) Kegiatan pengamanan daerah wisata, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	RENCANA KEGIATAN	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	SUBDITWASTER a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				
2.	SUBDITWISATA a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				
3.	SUBDITLEMNEG a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				
4.	SUBDITKILAS a. Pengamanan				
	b. Pengamanan				
JUMLAH					

c) permasalahan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

10) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)

a) Pelayanan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagai berikut:

NO.	KESATUAN	JUMLAH	
	 s.d. 20.. s.d. 20..
1	2	3	4
1.	SIM A - DHARMA WASPADA		
2.	SIM A UMUM		
3.	SIM BI		
4.	SIM BI UMUM		
5.	SIM BII		
6.	SIM BII UMUM		
7.	SIM C		

b) Memberikan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sebagai berikut:

NO.	KESATUAN	JUMLAH	
	 s.d. 20.. s.d. 20..
1	2	3	4
1.	DAFTAR BARU		
2.	TELITI ULANG		
3.	PENGGANTIAN		

c) Memberikan

- c) Memberikan pelayanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB):

NO.	KESATUAN	JUMLAH	
	 s.d. 20.. s.d. 20..
1	2	3	4
1.	PENDAFTARAN BARU		
2.	DUPLIKAT		
3.	GANTI KEPEMILIKAN		
4.	PERUBAHAN IDENTITAS		
5.	MUTASI LUAR DAERAH		

- d) Memberikan pelayanan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB):

NO.	URAIAN s.d. 20.. s.d. 20..
1	2	3	4
1.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 HITAM		
2.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 MERAH		
3.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 KUNING		
4.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 PUTIH		
5.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 HITAM		
6.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 MERAH		
7.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 KUNING		
8.	KENDARAAN BERMOTOR R 2 PUTIH		

- e) Penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

NO.	JENIS	PENERIMAAN (Rp)		PENYETORAN (Rp)	
		... s.d. ... 20..	... s.d. ... 20..	... s.d. ... 20..	... s.d. ... 20..
1	2	3	4	5	6
1.	SIM				
2.	STNK				
3.	STCK				
4.	BPKB				
5.	TNKB				
6.	KLIPENG				
7.	MUTASI				
JUMLAH					

- f) Penerimaan

f) Penerimaan dan penyaluran belangko SIM, STNK dan NPKB (SSB):

(1) s.d..... 20..

NO.	JENIS MATERIIL		SISA TAHUN LALU (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENYALURAN (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2		3	4	5	6	7
1.	SIM	KARTU CHIP					
		SIM					
		COLOR RIBBON					
2.	STNK	FORMULIR					
		BELANGKO					
3.	STNK	FORMULIR					
		BELANGKO					
4.	BPKB	ASLI					
		DUPLIKAT					
5.	TNKB R2	HITAM					
		MERAH					
		KUNING					
		PUTIH					
6.	TNKB R4	HITAM					
		MERAH					
		KUNING					
		PUTIH					

(2) s.d..... 20..

NO.	JENIS MATERIIL		SISA TAHUN LALU (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENYALURAN (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2		3	4	5	6	7
1.	SIM	KARTU CHIP					
		SIM					
		COLOR RIBBON					
2.	STNK	FORMULIR					
		BELANGKO					
3.	STNK	FORMULIR					
		BELANGKO					
4.	BPKB	ASLI					
		DUPLIKAT					
5.	TNKB R2	HITAM					
		MERAH					
		KUNING					
		PUTIH					
6.	TNKB R4	HITAM					
		MERAH					
		KUNING					
		PUTIH					

g) Pengelolaan dana Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) setiap bulan, sebagai berikut:

NO.	PERIODE ... s.d... 20..	PENERIMAAN	PENYETORAN	SISA
1. 20..			
2. 20..			
3. 20..			
JUMLAH				

h) Kecelakaan.....

h) Kecelakaan lalu lintas

(1) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITLANTAS POLDA									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

(2) tahun anggaran s.d. 20..., sebagai berikut:

NO.	SATUAN WILAYAH	JML TP	SELESAI	TUNGGAKAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDIK	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DITLANTAS POLDA									
2.	POLRES									
3.	POLRES									
4.	POLRES dst									

i) Korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi periode:

(1) s.d. 20...

NO.	SATKER	JUMLAH	KORBAN		
			MD	LB	LR
1.	DITLANTAS POLDA				
2.	POLRES				
3.	POLRES				
4.	POLRESdst				
JUMLAH					

(2) s.d. 20...

NO.	SATKER	JUMLAH	KORBAN		
			MD	LB	LR
1.	DITLANTAS POLDA				
2.	POLRES				
3.	POLRES				
4.	POLRESdst				
JUMLAH					

j) Pelanggaran lalu lintas periode tahun s.d. 20....., sebagai berikut:

NO.	KESATUAN sd 20... sd 20...	KET.
1	2	3	4	5
1.	DITLANTAS POLDA			
2.	POLRES			
3.	POLRES			
4.	POLRESdst			
JUMLAH				

k) Kecelakaan

k) Kecelakaan lalu lintas 5 (lima) tahun terakhir:

NO.	URAIAN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH				
			20....	20....	20....	20....	20....
1.	KECELAKAAN LALU LINTAS	KEJADIAN					
		KORBAN MENINGGAL DUNIA (MD)					
		LUKA BERAT (LB)					
		LUKA RINGAN (LR)					
		KERUGIAN MATERIIL					
		TABRAK LARI					
		PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS					
2.	PELANGGARAN LALU LINTAS	PELANGGARAN					
		PENYELESAIAN PERKARA					
		TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA					

l) Operasi Lintas, yaitu:

(1) s.d. 20.....

NO.	JENIS OPERASI	WAKTU PELAKSANAAN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

(2) s.d. 20.....

NO.	JENIS OPERASI	WAKTU PELAKSANAAN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

m) Dalam melakukan pelayanan prima kepada masyarakat Samsat mendapatkan penghargaan berupa: Contoh:

(1) ISO SNI 9001 : 2008

(2) Penghargaan Citra Pelayanan Prima Polantas tahun 2010 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (terlampir)

n) permasalahan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)

(1)

(2)dst

11) Satuan Brigade Mobil Daerah (Satbrimobda)

a) Pencapaian program sasaran Satbrimobda pada bulan Oktober 2011 s.d. November 2012, sebagai berikut:

(1) kegiatan dukungan operasional dan pembinaan:

KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	JUMLAH	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	KEGIATAN OPERASIONAL			
1.	SAR			
2.	PENJINAKAN BAHAN PELEDAK			
3.	STERILISASI DAN PENGAMANAN PRESIDEN RI			
4.	PENGAMANAN UNJUK RASA			
5.	PENANGKAPAN TERSANGKA TERORIS			
6.	PENGAWALAN IMIGRAN			
7.	PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA			
8.	PENGAMANAN KONSER MUSIK			
9.	PENGAMANAN PILKADA			
10.	TIM ESCAPE KUNJUNGAN PARA MENTERI DAN KAPOLRI			
II	KEGIATAN PEMBINAAN			
1.	PELATIHAN PROG PERCEPATAN AKUN KEUANGAN PEMERINTAH			
2.	PELATIHAN SISTEM PENGAMANAN KOTA			
3.	PELATIHAN INSTRUKTUR LAPANGAN			
4.	PELATIHAN SURVIVAL FUNGSI TEKNIS BRIMOB			
5.	PELATIHAN PEPPERBALL DAN AIR TASER			
6.	PELATIHAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PEMELIHARAAN PERAWATAN ANTI TEROR			
7.	PELATIHAN FOTOGRAFER			
8.	PELATIHAN FREE FALL			
9.	PELATIHAN SARTAKTIS			
10.	PELATIHAN SELAM			
11.	PELATIHAN PENJINAKAN BOM			
12.	PELATIHAN RUTIN PENGAMANAN VVIP			
13.	PELATIHAN KEMAMPUAN PELOPOR			
14.	PELATIHAN PENGENDALIAN HURU HARA (PHH)			
15.	PELATIHAN KEMAMPUAN GEGANA			
16.	PELATIHAN SAR DARAT (IMPK, MOUNTAINING)			
17.	PELATIHAN ANTI INSURJENSI			
18.	PELATIHAN MENEMBAK			

(2) Kegiatan fungsi terkait yang didukung oleh Satbrimobda:

NO.	JENIS KASUS	WAKTU	KEKUATAN PERSONEL	SASARAN	HASIL YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Robinamitra					
	a. Program					
	b. Program					
	c. Program					
	d. Programdst					

2. Operasi

1	2	3	4	5	6	7
2.	Operasi Kepolisian Kewilayahan Kendali Pusat					
	a. Operasi					
	b. Operasi					
	c. Operasi					
	d. Operasidst					
3.	Operasi Kepolisian mandiri kewilayahan					
	a. Operasi					
	b. Operasi					
	c. Operasi					
	d. Operasidst					

(3) Kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat atau kasus berskala nasional, yaitu:

(a) Oktober s.d. Desember 2011

NO.	JENIS KASUS	NOMOR/TANGGAL LAPORAN POLISI	HARI/TANGGAL KEJADIAN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

(b) Januari s.d. November 2012

NO.	JENIS KASUS	NOMOR/TANGGAL LAPORAN POLISI	HARI/TANGGAL KEJADIAN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

b) permasalahan Satuan Brigade Mobil Daerah (Satbrimobda)

(1)

(2) BHAKTI DHARMA WAGPADst

12) Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

a) Kegiatan pelaksanaan tugas Ditbinmas

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/ ORANG YANG DIBINA	DUKUNGAN ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	SUBDIREKTORAT PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN/POLISI KHUSUS (SUBDITBINSATPAM/ POLSUS)			
	a. Pembinaan petugas Satpam			
	b. Pembinaan			
	c. Pembinaan			
	d. kegiatan pembinaan dan koordinasi Polisi khusus			

e. Rapat

1	2	3	4	5
	e. Rapat koordinasi Polisi khusus			
	f. Pembinaan peningkatan kemampuan polisi khusus			
	g. Penerangan kepada penumpang kereta api			
	h. Pembinaan kepada instansi pengguna Satpam			
	i. Memberikan materi kepolisian terbatas kepada calon anggota Satpam di			
2.	SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KERJA SAMA (SUBDIT BINTIBLUH)			
	a. Safari			
	b. Silaturahmi			
	c. Pembinaandst			
3.	SUBDIREKTORAT KERJA SAMA (SUBDITKERMA)			
	a. Terselenggaranya rapat koordinasi dengan			
	b. Terselenggaranya rapat koordinasi dengan			
	c. Terselenggaranya rapat koordinasi dengan			
4.	SUBDIREKTORAT PEMBINAAN POLISI MASYARAKAT (SUBDITBINPOLMAS)			
	a. Pembinaan kepada kepala pos keamanan lingkungan dan awak pos keamanan lingkungan			
	b. Publikasi Polisi masyarakat			
	c. Pembinaan			
	d. Lokakarya			
	e. Sosialisasi implementasi strategi Polisi masyarakat dalam			

b) permasalahan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

(1)

(2) BHAJTI..DHARMA..WASPADA..dst

13) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

a) pelaksanaan pelayanan Polisi kepada masyarakat:

NO.	URAIAN KEGIATAN	JML	KET.
1	2	3	4
1.	LAPORAN POLISI (LP)		
2.	SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI (STTLP)		
3.	SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)		
4.	SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN (SKTLK)		
5.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)		
6.	SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)		
7.	SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI (SKLD)		

b) permasalahan

b) permasalahan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

(1)

(2)dst

b. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)

a) personel Polri dan PNS Polri secara Riil dan DSP berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, sampai dengan bulan 20.... sebanyak orang, terdiri dari anggota Polri sebanyak orang dan PNS sebanyak orang, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kekuatan personel Polri

NO.	PANGKAT	POLRI		KET.
		DSP	RIIL	
1	2	3	4	5
1.	Irjen			
2.	Brigjen			
3.	Kombes Pol			
4.	AKBP			
5.	Kompol			
6.	AKP			
7.	Inspektur			
8.	Ba/Ta			
Jumlah				

(2) Personel PNS

NO.	PANGKAT	POLRI		KET.
		DSP	RIIL	
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV			
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			
5.	Capeg			
Jumlah				

b) Kualifikasi pendidikan umum

NO.	PANGKAT	JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN					KET.
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1.								
2.								
3.								

c) Kualifikasi

c) Kualifikasi pendidikan pembentukan

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH	SELAPA	AKPOL	SEPA	SETUKPA	KET.
1.	PAMEN						
2.	PAMA						
3.	BINTARA						
JUMLAH							

d) Kualifikasi pendidikan pengembangan

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JML	LEM-HANAS	SESKO ABRI	SES-PATI	SESPIM	PTIK/STIK	SELAPA	SETUKPA	SEBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAMEN									
2.	PAMA									
3.	BINTARA									
JUMLAH										

e) Kualifikasi pendidikan spesialis

NO.	KEJURUAN	JUMLAH	PAMEN	PAMA	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				KET.	
					GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	LANTAS									
2.	RESERSE A. SERSE B. SERSE									
3.	INTEL A. INTEL B. INTEL									
4.	SABHARA									
5.	BRIMOB									
6.	SDM									
7.	SARPRAS									
8.	GARKU									
9.	PERENCANAAN									
	LAIN-LAIN									
JUMLAH										

f) Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PNS GOLONGAN IV		
2.	PNS GOLONGAN III		
3.	PNS GOLONGAN II		
4.	PNS GOLONGAN I		
JUMLAH			

g) Personel yang tidak memangku jabatan (non Job)

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
A	POLRI		
1.	KOMISARIS BESAR POLISI (KOMBESPOL)		
2.	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI (AKBP)		
3.	KOMISARIS POLISI (KOMPOL)		
4.	AJUN KOMISARIS POLISI (AKP)		
5.	INSPEKTUR POLISI SATU (IPTU)		
6.	INSPEKTUR POLISI DUA (IPDA)		
7.	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU (AIPTU)		

8. AJUN

2) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

a) Pelanggaran personel

(1) Data audit investigasi:

- (a) s.d. 20... : orang;
- (b) s.d. 20... : orang.

(2) Data penanganan Provos:

NO.	URAIAN PERKARA / 20.. 20... / 20...
1	2	3	4
1.			
2.			
JUMLAH			

(3) Rekapitulasi pelanggaran Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang telah disidang:

NO.	KESATUAN	JML	PUTUSAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI																KET.		
			GOL PANGKAT			TERCELA				MINTA MAAF				TIDAK LAYAK MENJALANI PROFESI POLRI							
			PM	PA	BA	PM	PA	BA	PM	PA	BA	PM	PA	BA	PM	PA	BA	PM		PA	BA
1.	POLDA																				
2.	POLRES																				
3.	POLRES																				
4.	POLRES																				
JUMLAH																					

(4) Rekapitulasi kasus diproses oleh subid Paminial:

NO.	TAHUN	JUMLAH LP	DIPROSES	SELESAI
1.	20....			
2.	20....			
3.	20....			
JUMLAH				

(5) Rekapitulasi etika profesi Polri
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

(a) Tahun 20.....

NO.	KESATUAN	GOL. PANGKAT			JENIS PELANGGARAN					JENIS HUKUMAN							DALAM PROSES	JML	
		PM	PA	BA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7			
1.	MAPOLDA																		
2.	POLRES																		
3.	POLRES																		
JUMLAH																			

(b) Tahun 20.....

NO.	KESATUAN	GOL. PANGKAT			JENIS PELANGGARAN					JENIS HUKUMAN							DALAM PROSES	JML	
		PM	PA	BA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7			
1.	MAPOLDA																		
2.	POLRES																		
3.	POLRES																		
JUMLAH																			

Keterangan

Keterangan:

Jenis pelanggaran:

1. Etika Kepribadian
2. Etika Kenegaraan
3. Etika Kelembagaan
4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
5. Pelanggaran lain (Gar sumpah / janji, pidana, Gar plin tidak masuk dinas)

Jenis Hukuman:

1. Dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Meminta maaf
3. Tidak terbukti
4. Pindah tugas jabatan yang berbeda
5. Pindah tugas wilayah yang berbeda
6. PDH (pemberhentian dengan hormat)
7. PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)

b) Permasalahan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

(1)

(2)dst

3) Sekolah Pendidikan Negara (SPN)

a) Operasional pendidikan

(1) Pelaksanaan Diklat

(a) Tahun 20....

NO.	GELOMBANG DAN JENIS PENDIDIKAN	KALENDER DIK	JUMLAH PESERTA DIDIK		EVALUASI	KET.
			REN (ORANG)	RIIL (ORANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dik Gelombang tahun pendidikan s.d. 20....			...% kurang ... orang, karena dan lulus%	hasil pre dan post test naik rata-rata%
2.	Dik Gelombang tahun pendidikan s.d. 20....			...% kurang ... orang, karena dan lulus%	hasil pre dan post test naik rata-rata%

(2) Tahun 20....

NO.	GELOMBANG DAN JENIS PENDIDIKAN	KALENDER DIK	JUMLAH PESERTA DIDIK		EVALUASI	KET.
			REN (ORANG)	RIIL (ORANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dik Gelombang tahun pendidikan s.d. 20....			...% kurang ...orang, karena dan lulus%	hasil pre dan post test naik rata-rata%
2.	Dik Gelombang tahun pendidikan s.d. 20....			...% kurang ...orang, karena dan lulus%	hasil pre dan post test naik rata-rata%

(2) Situasi

(2) Situasi 8 (delapan) komponen pendidikan

(a) Kurikulum
.....(b) Bahan Ajaran (Hanjar)
.....(c) Peserta didik
.....(d) Tenaga pendidik (Gadik)
.....(d) Tenaga kependidikan
.....(f) Metode
.....(g) Fasilitas pendidikan
.....(h) Alat Instruksi/Alat Penolong Instruksi (Alins/
Alongins)
.....(i) Anggaran
.....(j) Evaluasi pendidikan
.....

(3) Kuantitas dan kompetensi SDM

NO.	URAIAN	POLRI						PNS			JML	KET.		
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	HI			II	JML
1.	DSP													
2.	RIL													
3.	-/+													

(4) Teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh SPN
.....

(5) permasalahan Sekolah Pendidikan Negara (SPN)

c. Bidang Sarana Prasarana (Sarpras)

1) Biro Sarana Prasarana (Rosarpras)

a) Pengadaan barang/jasa

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

b) Pemeliharaan

b) Pemeliharaan barang

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

c) Usulan penghapusan barang

NO.	SURAT USULAN PENGHAPUSAN	BARANG YANG DIHAPUS	KET.
1	2	3	4
1.			
2.			

d) Data rekapitulasi Sarana Prasarana (Sarpras)

(1) Markas Kantor (Mako)

NO.	SATKER	KONDISI			JML	KET.
		BB	RR	RB		
1	2	3	4	5	6	7
1.	POLDA					
2.	SATBRIMOB					
3.	POLAIR					
4.	SPN					
5.	PJR					
6.	POLRES					
7.	POLSEK					
8.	POSPOL					
JUMLAH						

(2) Rumah Dinas (Rumdin)

NO.	SATKER	RUMDIN						BRK	FLAT	
		T. 36	T. 54	T. 70	T. 120	T. 130	T. 160			T. 250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	POLDA									
2.	SATBRIMOB									
3.	POLAIR									
4.	SPN									
5.	PJR									
6.	POLRES									
7.	POLSEK									
8.	POSPOL									
JUMLAH										

(3) Aset tanah yang telah sertifikat seluas M² Persil dan yang belum sertifikat seluas M² terdiri dari:

NO.	URAIAN	PERSIL	LUAS (M ²)
1	2	3	4
1.			
2.			

(4) Aset

(4) Aset digugat pihak ketiga:

NO.	ALAMAT DAN PEMANFAATAN ASET	LUAS (M ²)	PROSES
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

(5) Data bangunan, amunisi, alat angkut, alat apung, Alsuspol, Senpi, Alsintor dan Alsatri terlampir;

e) Data sarana prasarana berasal dari hibah:

NO.	JENIS MATERIIL	NILAI (Rp)	SURAT HIBAH	PEMBERI HIBAH
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

f) Data sarana prasarana disewakan kepada pihak ketiga:

NO.	JENIS MATERIIL	NILAI (Rp)	SURAT PERJANJIAN	PIHAK PEMINJAM
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

g) Pengadaan BMP

NO.	BMP	KETERANGAN 20.....	20.....	S.D. 20.....
1	2	3	4	5	6
1.	MT 88	DIPA 1 THN (Rp)			
		DISTRIBUSI (Liter)			
		REALISASI (Liter)			
		SISA (Liter)			
		PEMBAYARAN (Rp)			
2.	HSD	DISTRIBUSI (LITER)			
		REALISASI (Liter)			
		SISA (Liter)			
		PEMBAYARAN (Rp)			
3.	PELUMAS	DISTRIBUSI (Liter)			
		REALISASI (Liter)			
		SISA (Liter)			
		PEMBAYARAN (Rp)			
		REALISASI JS ANGKUT (Rp)			

h) Anggaran

h) Anggaran listrik dan air

(1) Pemakaian anggaran Listrik

NO.	URAIAN	20.....	20....	20.....
1	2	3	4	5
1.	DIPA			
2.	REVISI DIPA			
3.	TUNGGAKAN LISTRIK			
4.	TAGIHAN PEMAKAIAN			
5.	SISA PAGU			

(2) Pemakaian anggaran air

NO.	URAIAN	20.....	20....	20.....
1	2	3	4	5
1.	DIPA			
2.	REVISI DIPA			
3.	TUNGGAKAN AIR			
4.	TAGIHAN PEMAKAIAN			
5.	SISA PAGU			

i) Laporan Aset Barang Milik NegaraPolda dan jajaran, Komposisi Neraca per 31 Desember 20.... adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PER 31 DESEMBER 20....	PER 30 JUNI 20....	KET.
1	2	3	4	5
1.	Barang Konsumsi			
2.	Amunisi			
3.	Bahan untuk pemeliharaan			
4.	Suku cadang			
5.	Uraian Akun tidak ada			
6.	Pita cukai, materai dan leges			
7.	Bahan baku			
8.	persediaan untuk tujuan			
9.	Persediaan lainnya			
10.	Tanah			
11.	Peralatan dan Mesin			
12.	Gedung dan Bangunan			
13.	Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan			
14.	Aset tetap lainnya			
15.	Konstruksi dalam pengerjaan			
	Jumlah			

Jumlah Aset per 31 Desember 20.. sebesar: **Rp.,-**

Terdiri dari :

Aset lancar sebesar : Rp.,-

Aset tetap sebesar : Rp.,-

Aset lainnya sebesar : Rp.,-

Jumlah Total Aset : Rp.....,-

Keterangan

Untuk posisi aset per 30 Juni 20.... belum bisa diketahui, karena masih diadakan Rekonsiliasi data antara Satker/Satwil dengan Biro Sarpras dan KPKNL Palembang dan KPKNL Lahat serta DJKN

j) permasalahan

j) permasalahan Bidang Sarana Prasarana (Sarpras)

(1)

(2)dst

2) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes)

a) Rekapitulasi data Alat Kesehatan (Alkes) Polda

NO.	JENIS MATERIIL	JUMLAH	KONDISI		
			BB	RR	RB
	2	3	4	5	6
1.					
2.					

b) data obat-obatan

(1) Stock opname sumber APBN s.d. 20....

NO.	JENIS	SATUAN	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
1.				
2.				

(2) Stock opname sumber DPK dropping non APBN s.d. 20...

NO.	JENIS	SATUAN	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
1.				
2.				

c) Pengadaan barang/jasa

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

d) Pemeliharaan barang - WASPADA

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

e) permasalahan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes)

3) Bidang Teknologi Informatika (Bid TI)

a) Pengadaan barang/jasa

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

b) Pemeliharaan

b) Pemeliharaan barang

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

c) Data Alkomlek Polda

NO.	JENIS ALKOM		TAHUN PENGADAAN/ PENERIMAAN	JML	KONDISI			KET.
					B	RR	RB	
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	HANDY TALKI	UHF	400 MHz					
			800 MHz					
		VHF	LOW BAND					
			HIGH BAND					
		TRUNKING 800 MHz						
2.	REPEATER	UHF						
		VHF						
		TRUNKING						
3.	RADIO MOBIL	UHF						
		VHF						
		TRUNKING						
4.	BASE STATION	UHF						
		VHF						
		TRUNKING						
5.	HP SATELITE							
6.	RADIO HF / SSB							
7.	RDO PUNGGUNG / MANPACK							
8.	RADIO LINK							
9.	PABX							
10.	EXTENTION PABX							
11.	SALURAN TELKOM							
12.	MEGA PHONE							
13.	AIPHONE							
14.	FAKSIMILE							
15.	KOMPUTER							
16.	TELEX							
17.	STATION KECIL (SBK)	BUMI	CAAVIS					
			SAINCO					
			KASIM					
18.	LEASED CHANEL							
19.	SOUND SYSTEM							
20.	CONFERENCE SYSTEM							
21.	WIRELES							
22.	MOBIL DIRECTION FINDER							
23.	TEST BAND							
24.	SWEEP GENERATOR							
25.	SPEKTRUM ANALIZER							
26.	LOGIC CCT ANALIZER							
27.	SIGNAL GENERATOR							
28.	SWR							
29.	MECHANICAL TOOL							
30.	ELECTRONIC TOOL							
31.	REPAIR VAN							
32.	MOBIL KOMOPS							
33.	GENSET							
34.	UPS							
35.	SOLAR CELL							
36.	SST TOWER 100							

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	SST TOWER 90						
38.	SST TOWER 80						
39.	SST TOWER 75						
40.	SST TOWER 60						
41.	SST TOWER 50						
42.	SST TOWER 40						
43.	SST TOWER 30						
44.	SST TOWER 20						
45.	SST TOWER 15						
46.	TRIANGLE 60						
47.	TRIANGLE 50						
48.	TRIANGLE 40						
49.	TRIANGLE 30						
50.	TRIANGLE 20						
51.	TRIANGLE 15						
52.	DAN LAIN-LAIN						

d) Pemakaian anggaran untuk telepon

NO.	URAIAN	20.....	20....	20.....
1.	DIPA			
2.	REVISI DIPA			
3.	TUNGGAKAN TELEPON			
4.	TAGIHAN PEMAKAIAN			
5.	SISA PAGU			

e) permasalahan Bidang Teknologi Informatika (Bid TI)

(1)

(2)dst

4) Pelayanan Markas (Yanma)

a) Pengadaan barang/jasa

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

b) Pemeliharaan barang

NO.	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET.
1.						
2.						

c) permasalahan Pelayanan Markas (Yanma)

(1)

(2)dst

d. Bidang.....

d. Bidang Anggaran Keuangan (Garkeu)

1) Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN)

a) Daya serap, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PROSEN-TASE (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja pegawai				
2.	Belanja barang				
3.	Belanja modal				
	JUMLAH				

b) anggaran bersifat khusus/kontinjensi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Operasional				
2.	Operasional				
3.	Operasional				
	JUMLAH				

c) tunjangan kinerja

NO.	URAIAN/BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	SISA				
2.	PENERIMAAN				
a.	Bulan				
b.	Bulan				
c.	Bulan				
	JUMLAH				

2) Non APBN:

a) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

NO.	URAIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sisa			
2.	Transaksi			
3.	Transaksi			
	JUMLAH			

b) Dana Pemeliharaan Kesehatan/DPK (Rumah Sakit Badan Layanan Umum/Objek Vital/dana lainnya)

NO.	URAIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sisa			
2.	Terima dari			
3.	Transaksi			
	JUMLAH			

c) dana.....

c) dana lainnya

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Uang parkir			
2.	Sewa aset			
3.			
	JUMLAH			

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP:

a) jasa Kepolisian

NO.	URAIAN TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SIM			
2.	STNK			
3.	STCK			
	JUMLAH			

b) utang

NO.	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	makan tahanan				
2.	telepon				
3.	gas				
4.	air				
5.	listrik				
	JUMLAH				

c) piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi/
denda keterlambatan

NO.	URAIAN	DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	tuntutan perbendaharaan				
2.	tuntutan ganti rugi				
3.	denda keterlambatan				
	JUMLAH				

d) Tuntutan Perbendaharaan/TP

NO.	URAIAN	TA (Rp)	TA (Rp)	KET.
1	2	3	4	6
1.	Jumlah kerugian			
2.	Jumlah angsuran			
3.	Sisa pembebanan			
	JUMLAH			

e) Tuntutan.....

e) Tuntutan Ganti Rugi TGR

NO.	URAIAN	TA (Rp)	TA (Rp)	KET.
1	2	3	4	6
1.	Jumlah kerugian			
2.	Jumlah angsuran			
3.	Sisa pembebanan			
	JUMLAH			

4) Badan Layanan Umum/BLU

NO.	URAIAN/BULAN	PENDAPATAN (Rp)		SISA (Rp)	KET.
		PENERIMAAN	PENGELUARAN		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	JUMLAH				

5) permasalahan bidang anggaran keuangan

a)

b)dst

e. Satker pendukung lainnya:

1) Bidang Hukum (Bidkum)

a) Pelaksanaan penyusunan peraturan Kasatker

NO.	PERATURAN TENTANG	NOMOR/TANGGAL PENGESAHAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
A	PERATURAN KAPOLDA			
1.				
2.				
B	PERATURAN KASATKER / KAPOLRES			
1.				
2.				

b) Pelayanan saran hukum

NO.	URAIAN PERMASALAHAN	PROSES PENYELESAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.				
2.				

c) permasalahan Bidang Hukum (Bidkum)

(1)

(2)dst

2) Sekretariat

2) Sekretariat Umum (Setum)

Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-menyurat

- a) Tahun Anggaran 20..., jumlah surat keluar surat, jumlah surat masuk surat;
- b) Tahun Anggaran 20..., jumlah surat keluar surat, jumlah surat masuk surat;
- c) permasalahan Sekretariat Umum (Setum).

3) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

- a) Kegiatan audit/pemeriksaan

(1) Kegiatan s.d. 20.....

NO.	KEGIATAN	JML GIAT	HASIL PELAKSANAAN	KET.
1	2	4	5	6
I	AUDIT/PEMERIKSAAN RUTIN ITWASUM POLRI: a. Tahap I (perencanaan dan pengorganisasian) b. Tahap II (pelaksanaan dan pengendalian)			
II	AUDIT/PEMERIKSAAN RUTIN ITWASDA a. Tahap I (perencanaan dan pengorganisasian) b. Tahap II (pelaksanaan dan pengendalian)			
III	VERIFIKASI			
IV	PEMERIKSAAN KHUSUS			
V	REVIU LAPORAN KEUANGAN			
VI	PENGAWASAN OPERASI (WASOPS)			
VII	HASIL UJI NILAI/PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT TAHAP I: a. Uji nilai hasil audit/pemeriksaan rutin oleh Itwasum Polri b. Audit/pemeriksaan BPK RI c. Uji nilai hasil audit/pemeriksaan rutin oleh Itwasda		Selesai (S), Belum Ditindaklanjuti (BD) dan Dipantau (D) Selesai (S), Belum Ditindaklanjuti (BD) dan Dipantau (D) Selesai (S), Belum Ditindaklanjuti (BD) dan Dipantau (D)	
VIII	HASIL UJI NILAI/PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT TAHAP II: a. Uji nilai hasil audit/pemeriksaan rutin oleh Itwasum Polri b. Audit/pemeriksaan BPK RI c. Uji nilai hasil audit/pemeriksaan rutin oleh Itwasda		Selesai (S), Belum Ditindaklanjuti (BD) dan Dipantau (D) Selesai (S), Belum Ditindaklanjuti (BD) dan Dipantau (D) Selesai (S), Belum Ditindaklanjuti (BD) dan Dipantau (D)	
IX	PRE AUDIT			

(2) Kegiatan

(2) Kegiatan s.d. 20.....

b) Rekapitulasi tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas):

Data tahun 20..... telah ditindaklanjuti surat, dengan rincian:

- (1) Selesai surat dengan rincian Proses (P) surat, Selesai Benar (SB) surat dan Selesai Tidak Benar (STB) surat
- (2) Belum selesai surat

NO.	ASAL SURAT	TINDAK LANJUT												JML	KET.
		RES			RES			RES			RES				
		P	SB	STB	P	SB	STB	P	SB	STB	P	SB	STB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	KAPOLRI														
2.	MENSEKNEG														
3.	KOMNAS HAM														
4.	KOMPOLNAS														
5.	OMBUDSMAN														
6.	LBH														
7.	MASYARAKAT LANGSUNG														
J U M L A H															

c) permasalahan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. KESIMPULAN

.....

b. REKOMENDASI

.....

V. PENUTUP



Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20.....

KETUA TIM

Ttd.

.....
.....

3. CONTOH FORMAT LAPORAN TUTUP BUKU (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

CONTOH

SATTAMA : BUKU KAS BANK
 SATKER : BULAN :
 NPWP : T.A. : 20....
 NO. MINKU : SUMBER :

NO. BK	URAIAN	REF	MAK/ MAP	DEBET	KREDIT	TUNAI		BANK	
						DEBET	KREDIT	REK.....	DEBET KREDIT
	---Saldo bulan lalu---								
	---1 ... 20.---								
1.	Diterima Sp2d								
2.									
3.									
4.									
	Jumlah ----- -----								

Pada hari ini, Tanggal berdasarkan Sprin Kapolri nomor: Sprin/...../...../...../..... tanggal tentang pelaksanaan verifikasi dalam rangka Sertijab Ka....., Buku Kas Bank ditutup untuk keperluan verifikasi dengan sisa sebesar Rp. (terbilang:), terdiri dari:

a. Tunai Rp.
 b. Bank Rp.
 Jumlah Rp.

Jakarta,

Mengetahui: **BHAKTI - DHARMA - WASPADA**
 KA/WAKA

KAURKEU

Ttd.

Ttd.

MENGETAHUI
KETUA TIM VERIFIKASI ITWASUM POLRI/ITWASDA/SIWAS

Ttd.

(2) Kegiatan s.d. 20.....

b) Rekapitulasi tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas):

Data tahun 20..... telah ditindaklanjuti surat, dengan rincian:

- (1) Selesai surat dengan rincian Proses (P) surat, Selesai Benar (SB) surat dan Selesai Tidak Benar (STB) surat
- (2) Belum selesai surat

NO.	ASAL SURAT	TINDAK LANJUT												JML	KET.
		RES			RES			RES			RES				
		P	SB	STB	P	SB	STB	P	SB	STB	P	SB	STB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	KAPOLRI														
2.	MENSEKNEG														
3.	KOMNAS HAM														
4.	KOMPOLNAS														
5.	OMBUDSMAN														
6.	LBH														
7.	MASYARAKAT LANGSUNG														
J U M L A H															

c) permasalahan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. KESIMPULAN

.....

b. REKOMENDASI

.....

V. PENUTUP



Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20.....

KETUA TIM

Ttd.

.....
.....

3. CONTOH FORMAT LAPORAN TUTUP BUKU (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

CONTOH

SATTAMA : BUKU KAS BANK
 SATKER : BULAN :
 NPWP : T.A. : 20....
 NO. MINKU : SUMBER :

NO. BK	URAIAN	REF	MAK/ MAP	DEBET	KREDIT	TUNAI		BANK	
						DEBET	KREDIT	REK.....	
								DEBET	KREDIT
	---Saldo bulan lalu---								
	---1 ... 20.---								
1.	Diterima Sp2d								
2.									
3.									
4.									
	Jumlah ----- -----								

Pada hari ini, Tanggal berdasarkan Sprin Kapolri nomor: Sprin/...../...../...../..... tanggal tentang pelaksanaan verifikasi dalam rangka Sertijab Ka....., Buku Kas Bank ditutup untuk keperluan verifikasi dengan sisa sebesar Rp. (terbilang:), terdiri dari:

a. Tunai Rp.
 b. Bank Rp.
 Jumlah Rp.

Jakarta,

Mengetahui: **BHAKTI - DHARMA - WASPADA**
 KA/WAKA

KAURKEU

Ttd.

Ttd.

MENGETAHUI
KETUA TIM VERIFIKASI ITWASUM POLRI/ITWASDA/SIWAS

Ttd.

4. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

CONTOH

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM JENIS BELANJA T.A. 20...
DALAM RANGKA VERIFIKASI SERTIJAB KA.....

NO.	UARAIAN	BULAN S.D. 20....				
		ALOKASI (RP)	REVISI (RP)	REALIASI (RP)	SISA (RP)	% SERAP
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM :					
	BELANJA					
2.	PROGRAM:					
	BELANJA					
	BELANJA					
	JUMLAH					

Mengetahui:
KA/WAKA

Ttd.

Jakarta,

KAURKEU

Ttd.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
NOMOR: BA/...../...../.....

Pada hari ini Tanggal Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

NO.	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN TIM VERIFIKASI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/...../...../..... tanggal tentang perintah pelaksanaan verifikasi pada

Telah melaksanakan pemeriksaan pada meliputi:

1. Buku kas Bank; dan
2. Uang tunai.

Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kas:
 - a. Jumlah uang tunai : Rp.
 - b. Jumlah uang di Bank : Rp.
 - c. Jumlah uang tunai dan Bank : Rp.
 - d. Jumlah menurut buku : Rp.

SELISIH +/- : Rp.

2. Jumlah uang tunai dalam peti uang terdiri dari:

- a. Jumlah uang kertas Rp. 100.000,- : Rp.
- b. Jumlah uang kertas Rp. 50.000,- : Rp.
- c. Jumlah uang kertas Rp. 20.000,- : Rp.
- d. Jumlah uang kertas Rp. 10.000,- : Rp.
- e. Jumlah uang kertas Rp. 5.000,- : Rp.
- f. Jumlah uang kertas Rp. 2.000,- : Rp.
- g. Jumlah uang kertas Rp. 1.000,- : Rp.
- h. Jumlah uang kertas Rp. 500,- : Rp.
- i. Jumlah uang kertas Rp. 200,- : Rp.
- j. Jumlah uang kertas Rp. 100,- : Rp.

JUMLAH : Rp.

JUMLAH MENURUT BUKU : Rp.

SELISIH +/- : Rp.

3. Ikhtisar....

3. Ikhtisar penerimaan dan pengeluaran uang:
 - a. sisa bulan lalu Rp.
 - b. penerimaan bulan ini Rp.
 - c. jumlah Rp.
 - d. pengeluaran bulan ini Rp.
 - e. sisa bulan ini Rp.
4. Tempat penyimpanan uang di Rp.
5. Penyimpanan kunci peti uang oleh
6. Pelaksanaan buku Kas Bank : s.d.
7. Pemeriksaan terakhir pada :
8. Catatan lain-lain
9. Penutup.

Berita acara ini dilampirkan:

- a. Pemeriksaan selesai tanggal
- b. Berita acara ini dibuat dalam rangka verifikasi

Jakarta,

KAURKEU

KETUA TIM VERIFIKASI

Ttd.

Ttd.

**MENGETAHUI
KA/WAKA**

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI UTANG ATAU PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: SP/...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat/NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Polda/Polres/Polsek tidak mempunyai utang atau pinjaman dari pihak ketiga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam rangka verifikasi Itwasum/Itwasda Polda/Siwas Polres pada untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
KAURKEU

Jakarta,

KETUA TIM VERIFIKASI

Ttd.

Ttd.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN BELANGKO HASIL PENGADAAN PNBP (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BELANGKO HASIL PENGADAAN PNBP

NOMOR: BA/...../...../.....

Pada hari ini Tanggal Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

NO.	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN TIM VERIFIKASI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/...../...../..... tanggal tentang perintah pelaksanaan verifikasi pada

Telah melaksanakan pemeriksaan pada meliputi:

1. Buku kas PNBP; dan
2. Jumlah belangko

Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kas:
 - a. Jumlah uang tunai : Rp.
 - b. Jumlah uang di Bank : Rp.
 - c. Jumlah uang tunai dan Bank : Rp.
 - d. Jumlah menurut buku : Rp.
- SELISIH +/- Rp.**

2. pemeriksaan belangko:

NO.	JENIS BELANGKO	JUMLAH -	PENGGUNAAN	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Berita.....

Berita acara ini dilampirkan:

1. Pemeriksaan selesai tanggal
2. Berita acara ini dibuat dalam rangka verifikasi

KAURKEU

KETUA TIM VERIFIKASI

Ttd.

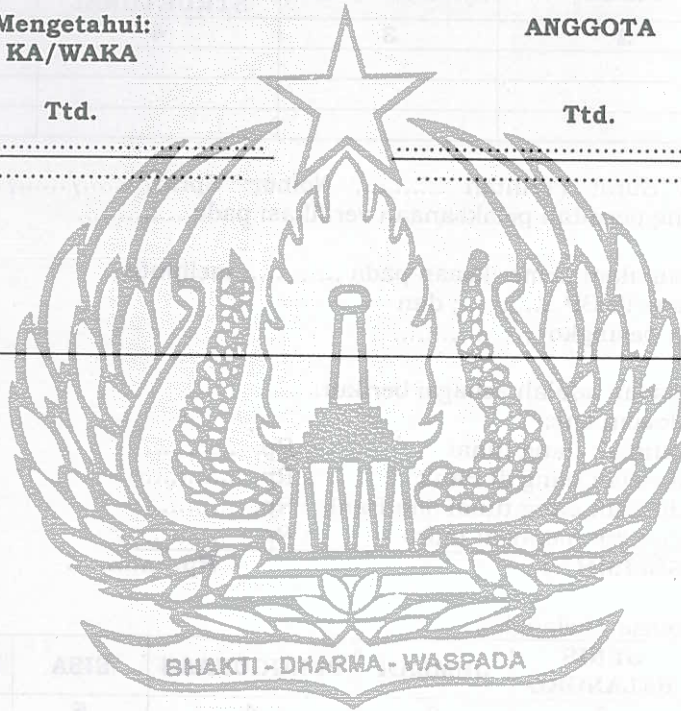
Ttd.

**Mengetahui:
KA/WAKA**

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.



8. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG MILIK NEGARA YANG TERSEDIA DI GUDANG (DAPAT DISESUAIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

KOPSTUK

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK
BARANG MILIK NEGARA YANG TERSEDIA DI GUDANG
NOMOR: BA/...../...../.....**

Pada hari ini Tanggal Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

NO.	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN TIM VERIFIKASI
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/...../...../..... tanggal tentang perintah pelaksanaan verifikasi pada telah melaksanakan pemeriksaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh:

NO.	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN STRUKTURAL
1	2	3	4
1.			
2.			

Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Senjata Api (Senpi) dan Amunisi:

NO.	JENIS BMN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

2. Perlengkapan perorangan Lapangan (Kaporlap):

NO.	JENIS BMN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

Berita

Berita acara ini dilampirkan:

- a. Pemeriksaan selesai tanggal
- b. Berita acara ini dibuat dalam rangka verifikasi

KEPALA GUDANG

KETUA TIM VERIFIKASI

Ttd.

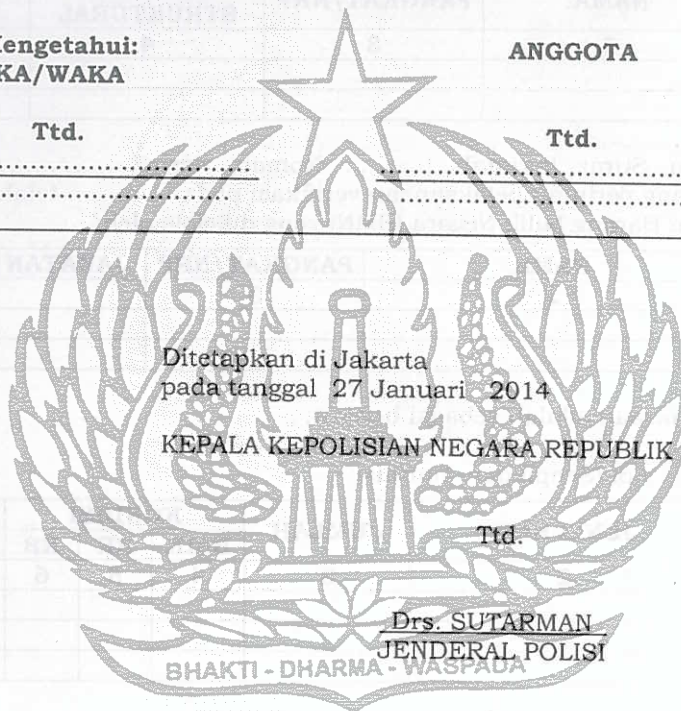
Ttd.

**Mengetahui:
KA/WAKA**

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA